



Media: Seputar Indonesia

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 Oktober 2016

Halaman: 11

Dewan Setuju Pemkot Lepas Aset Rp266 M

YOGYAKARTA – Polemik pelepasan aset Pemkot Yogyakarta senilai Rp266 miliar akhirnya berakhir setelah DPRD Kota Yogyakarta memberi lampu hijau kepada eksekutif untuk melepas aset sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Sudah tidak ada permasalahan yang mengganjal antara Dewan dengan Pemkot. Persetujuan sudah bisa dilakukan," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Zenni Lingga usai rapat finalisasi di DPRD Kota Yogyakarta, kemarin.

Diakuinya, sempat ada perbedaan persepsi antara panitia khusus yang membahas persetujuan dewan dengan tim dari pemkot. Terutama terkait ada-

nya serah terima prasarana, personel, perlengkapan dan dokumen (P3D) dengan Pemda DIY pada Selasa (27/9) lalu.

Diungkapkannya, dalam serah terima tersebut disertai paragraf penjelasan. Yakni khusus mengenai aset atau sarana fisik, akan dilimpahkan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Sehingga usai adanya persetujuan Dewan pihaknya langsung memprosesnya.

"Intinya per 1 Januari 2017,

sejumlah urusan yang sebelumnya dikelola Kota Yogyakarta resmi berpindah ke DIY sesuai aturan dari pemerintah pusat," jelasnya.

Aset senilai ratusan miliar rupiah itu terdiri atas enam bidang, meliputi tanah senilai Rp57,7 miliar, peralatan dan mesin senilai Rp68,4 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp131,9 miliar, jalan dan jaringan Rp270,3 juta serta konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp7,3 miliar.

Namun yang masih menjadi sorotan adalah pelimpahan pengelolaan Terminal Giwangan ke pemerintah pusat. Jika nilai aset diluar tanah dan bangunan mencapai lebih dari Rp5 miliar, maka pemkot akan mengajukan permohonan persetujuan ke Dewan. Namun perkiraan awal nilai aset tidak sampai mi-

liaran rupiah karena nantinya hanya pengelolaan yang dilimpahkan, sementara asetnya tetap milik Pemkot Yogyakarta.

"Tapikhusus Terminal Giwangan ini masih perlu kami bicarakan lagi. Karena pengelolaannya bukan Pemda DIY tapi pemerintah pusat," imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, M Ali Fahmi mengatakan, rapat finalisasi di tingkat pansus memang memberi lampu hijau penghapusan dan pelepasan aset Pemkot Yogyakarta tersebut. Namun rapat paripurna baru akan berlangsung Jumat (30/9) malam tadi.

"Baru akan diparipurnakan. Tapi hingga sore ini (kemarin), kemungkinan besar ada persetujuan," ujarnya saat dihubungi kemarin sore.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005